

**DUKUNGAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PARTISIPASI DALAM
ORGANISASI DAN PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP
KINERJA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI MTS NEGERI
KABUPATEN BOYOLALI**

TESIS

**Diajukan Kepada
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Manajemen Pendidikan**



OLEH:

CHOIRIL ANWAR

NIM : Q.100050088

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan cultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

John C. Bock, (dalam Zamroni, 2001 : 2) mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai : a) memasyarakatkan ideology dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan.

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar untuk mendewasakan anak. Mendewasakan anak berarti memberikan bimbingan, arahan serta sekaligus menjadikan anak menjadi lebih dewasa atau mandiri dan kreatif. Untuk itu diperlukan seorang pendidik yang memiliki kualitas sumber daya yang baik. Salah satu sifat sumber daya yang harus dimiliki oleh semua pendidik adalah professional.

Secara makro peranan guru Bimbingan dan Konseling (BK) sangat penting. Hal ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, yang tidak ringan. Tugas yang tidak ringan akan dapat terlaksana dengan baik

bilamana guru yang bersangkutan memiliki minat yang tinggi, kemampuan yang baik, serta sikap dan kesadaran yang tinggi sesuai dengan kemampuan professional yang diperoleh di perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Permadi (1999: 106), “Bahwa guru yang mengikuti pendidikan lanjutan harus dipandang sebagai melaksanakan tugas pengembangan professional sehingga tugas-tugas hariannya dapat dikurangi dan setelah memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi mendapat prioritas untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.”

Di Madrasah Tsanawiyah peranan guru BK sangat penting, karena pada jenjang ini secara psikologis siswa merupakan individu yang sedang mengalami masa transisi (peralihan), yaitu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa transisi ini biasanya anak cenderung memiliki perilaku yang kurang wajar, seperti rasa rendah diri, egois, tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar, bahkan masih banyak lagi masalah yang seakan-akan membelenggu bagi dirinya sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Berbagai masalah kompleks yang mungkin dialami siswa, membutuhkan guru BK. Ini berarti guru BK memiliki kedudukan yang sangat strategis. Masalah yang kompleks yang secara nyata dihadapi siswa antara lain seperti dikemukakan oleh Purwanto (2002: 171-172), yaitu “banyak diantara anak-anak kita yang tidak mengetahui kemana harus melanjutkan sekolahnya yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Banyak anak-anak remaja yang mengalami kesukaran dalam cara belajar, dalam menghadapi percintaan, dalam menyesuaikan terhadap teman-teman sekelas, perbuatan asusila dan

lain-lain.” Secara professional tugas dan tanggung jawab guru BK adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap semua siswa baik yang bermasalah maupun yang belum bermasalah.

Sementara tugas dan tanggung jawab dalam program kerja BK seperti yang tertulis dalam Diklat Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling 2004) yang dikenal dengan istilah pola 17, meliputi : layanan pembelajaran. Layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Jadi dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat kompleks, untuk memperoleh hasil kerja dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling seperti yang dicantumkan dalam pola 17, guru BK tidak akan lepas dari kemampuan profesionalismenya. Kemampuan professional yang dimiliki itu antara lain latar belakang yang memadai, memiliki sikap terhadap profesi, pengalaman kerja yang banyak, dan didukung oleh ketrampilan-ketrampilan lain yang mampu menambah dan menumbuhkan wawasan atau informasi.

Latar belakang pendidikan guru BK, ikut menentukan keberhasilan dalam proses pelaksanaan program kerja BK. Latar belakang pendidikan dalam hal ini jenjang pendidikan baik S1 maupun D3 yang telah diperoleh melalui lembaga pendidikan baik FKIP, IKIP maupun STKIP dengan jurusan atau program studi BP/BK/PPB.

Murad dalam Suharnani (2001) menyatakan bahwa guru BK khususnya di Madrasah Tsanawiyah yang menunaikan tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan tetapi sesuai dengan bidang profesi yang dimiliki, walaupun mereka memiliki tingkat pendidikan ijazah S1 dan D3. kurang

berhasilnya peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah yang baik, karena disebabkan oleh salah satu faktor latar belakang pendidikan guru BK yang menduduki tingkat atas dalam peranannya, yaitu secara professional dapat meningkatkan prestasi belajar siswanya. Karena faktor latar belakang pendidikan yang kurang tepat yang dimiliki oleh guru BK seperti halnya : pendidikan yang dimiliki bukan dari jurusan BK, hal ini justru menjadi penyebab terhadap posisi guru BK yang sampai saat ini didirikan oleh guru bidang studi lain karena mereka dianggap tidak mampu melaksanakan program kerja sesuai dengan keahliannya, bahkan tidak berhasil dalam kerjanya. Selain profesi tersebut, kenyataan menunjukkan di Madrasah Tsanawiyah guru BK yang ditugasi tugas lain seperti tugas di ruang Perpustakaan, di Bagian Tata Usaha (administrasi), dan di ruang koperasi sekolah. Hal ini layak dan perlu adanya keprihatinan bagi seorang profesi BK, bahkan perlu adanya pembinaan dan peningkatan bagi para pakar psikologi pendidikan dalam upaya memberikan bimbingan sebagai strategi dalam mengentaskan keprihatinan keberadaan kinerja guru BK.

Selain faktor latar belakang pendidikan yang memadai, seorang guru bimbingan dinyatakan professional, menurut Usman (2000) bilamana memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut : memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki klien/objek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya; diakui oleh masyarakat karena memang diperlakukan jasanya di masyarakat. Pekerjaan baku merupakan wujud dari seorang yang memiliki kemampuan

professional, hal ini dapat dilihat melalui status pekerjaan apakah bernaung dalam pemerintah (pegawai negeri) ataukah status honorer. Jika memiliki status pegawai negeri, imbalan akan disesuaikan dengan golongan yang dimilikinya, sedangkan untuk pegawai yang berstatus honorer, pemberian imbalan akan disesuaikan dengan kemampuan dana anggaran sekolah dan diperhitungkan sesuai dengan jumlah jam mengajar.

Organisasi profesi merupakan suatu kelompok yang anggotanya para pegawai negeri sipil dan juga ada yang swasta. Bimbingan dan konseling memiliki organisasi profesi, partisipasi dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling yang dapat diikuti melalui organisasi profesi ini adalah sebagai sarana komunikasi dalam rangka menggabungkan dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap siswa.

Pelaksanaan kode etik nampaknya penting bagi seseorang yang memiliki profesi. Kode etik merupakan dasar seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kode etik yang mendasari guru dalam melakukan sesuatu pekerjaannya dapat ditunjukkan atas dasar patokan/aturan/tata krama yang dapat dijadikan alat belajar bagi pengembang profesi bimbingan dan konseling menuju ke arah peningkatan mata pelajaran yang lebih bermutu.

Latar belakang, pekerjaan baku, imbalan yang memadai, partisipasi dalam organisasi profesi, pelaksanaan kode etik profesi kesemuanya merupakan faktor yang ada di dalam profesionalisme yang akan mempengaruhi kinerja seorang bimbingan. Pekerjaan baku dan imbalan yang memadai mempengaruhi kinerja seorang bimbingan. Oleh karena itu aspek-

aspek yang dipilih untuk diteliti adalah aspek latar belakang pendidikan, partisipasi dalam organisasi profesi, dan pelaksanaan kode etik,.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa masalah penugasan Bimbingan dan Konseling sesuai dengan bidang garapanya menjadi fokus perhatian baik bagi guru bidang studi non Bimbingan dan Konseling maupun bagi koordinator BK. Sementara masalah penugasan guru BK yang tidak sesuai (dengan bidang garap) akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya.

Masih banyak guru BK yang bukan dari lulusan yang tepat (non professional) ditugasi Kepala Sekolah menjadi guru Bimbingan dan Konseling di sekolah. Tugas yang diberikan oleh Kepala Sekolah dengan dukungan Surat keputusan (SK) dari madrasah yang bersangkutan, ini pada umumnya karena guru yang bersangkutan dituntut untuk memenuhi 18 jam mengajar. Biasanya guru yang diberikan tugas tersebut karena disebabkan oleh faktor kekurangan jam mengajar, sementara mereka di Madrasah Tsanawiyah dituntut harus melaksanakan tugas mengajar minimal 18 jam. Hal ini tentu merupakan kendala terhadap kinerja yang dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling atas profesinya. Selain itu kebijakan pemerintah masih belum bisa terealisasi dengan baik, hal ini berkaitan dengan standard idealnya satu madrasah harus menangani 150 siswa (Anonim,2000:Surat Edaran Mendikbud 143/MPK/2000). Sampai saat ini masih banyak madrasah yang hanya memiliki satu guru Bimbingan dan Konseling, bahkan masih ada madrasah

MTs tentu akan mempengaruhi hasil kerja optimal dari guru BK yang bersangkutan.

Berbagai masalah di atas dapat teratasi dengan baik, apabila didukung oleh kerjasama dari Kepala Sekolah, koordinator BK dan guru BK serta pihak pemerintah dalam upaya pelaksanaan program kerja BK di sekolah. Di samping itu kesadaran para guru BK itu sendiri dalam upaya mengembangkan profesi sesuai dengan tuntutan jaman.

Pelaksanaan program kerja yang optimal dapat terwujud dengan baik, bilamana didukung kemampuan professional yang tepat. Sementara profesionalisme guru BK dipandang serasi jika tidak lepas dari adanya latar belakang pendidikan yang memadai, sikap terhadap profesi, dan dukungan pengalaman kerja yang luas.

Ketidakprofesian guru Bimbingan dan Konseling, justru akan melahirkan suatu teknik kerja yang kurang sempurna, hal ini disebabkan karena guru BK yang bersangkutan tidak memiliki dasar pendidikan yang sesuai dengan bidangnya, seperti mereka bukan dari lulusan BK walaupun mereka memiliki jenjang pendidikan S1 maupun D3. di samping itu banyaknya anggapan bahwa guru BK adalah guru yang paling santai dan banyak waktu, guru BK diserahi tugas lain yang kiranya tidak sesuai dengan bidangnya. Anggapan ini semua, sebenarnya berawal dari kurangnya profesionalisme guru BK itu sendiri sehingga mereka kurang mengembangkan kemampuan di bidang profesi. Tidak berkembangnya kemampuan guru BK

tersebut akan mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan program kerja.

Profesionalisme guru BK senantiasa menjadikan permasalahan sedukungan dengan pelaksanaan program kerja yang tercantum pada pola 17. profesionalisme guru BK perlu ditingkatkan dan dikembangkan supaya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang baik dalam proses kegiatan belajar mengajar di madrasah. Untuk itu faktor profesionalisme guru BK masih layak untuk dijajaki lebih jauh terutama mengenai pelaksanaan program kerja di madrasah yang berkaitan dengan pola 17.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada bimbingan konseling.
2. Kurang tepatnya strategi belajar yang digunakan guru Bimbingan Konseling di dalam menyelesaikan masalah dengan kliennya.
3. Kurangnya motivasi belajar siswa yang harus diselesaikan dengan peran aktif guru bimbingan konseling di Madrasah.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini lebih efektif, efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan yang dimaksud adalah Pendidikan terakhir Guru Bimbingan konseling.
2. Partisipasi dalam organisasi yaitu Guru bimbingan konseling aktif mengikuti MGMP, IPKOM, IGPI, ISKIN, IDPI, IIBKIN..
3. Pelaksanaan kode etik yaitu merupakan ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh siapa saja yang berkecimpung dalam bidang bimbingan dan penyuluhan.
4. Kinerja Guru Bimbingan Konseling dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada siswa yang di fokuskan pada pola 17.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adakah dukungan yang signifikan latar belakang pendidikan, partisipasi dalam organisasi, dan pelaksanaan kode etik profesi secara bersama dengan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali ?
2. Adakah dukungan yang signifikan latar belakang pendidikan dengan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali ?
3. Adakah dukungan yang signifikan partisipasi dalam organisasi profesi dengan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali ?
4. Adakah dukungan yang signifikan pelaksanaan kode etik profesi dengan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat profesionalisme dan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali. Oleh karena adanya latar belakang pendidikan dan beberapa aspek profesionalisme terhadap kinerja guru bimbingan, maka penelitian ini untuk mengungkap :

1. Dukungan latar belakang pendidikan dengan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali.
2. Dukungan partisipasi dalam organisasi profesi dengan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali.
3. Dukungan pelaksanaan kode etik profesi dengan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali.
4. Dukungan latar belakang pendidikan, partisipasi dalam organisasi dan Pelaksanaan kode etik profesi secara bersama dengan kinerja guru bimbingan di MTs Negeri se Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya meningkatkan pelaksanaan program kerja guru Bimbingan dan Konseling sesuai yang dicanangkan dalam pola 17.

Profesionalisme menempati posisi yang strategis dalam upaya perbaikan kualitas hasil belajar anak didik di sekolah. Profesionalisme oleh guru BK dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu latar belakang pendidikan sikap terhadap profesi dan pengalaman kerja. Ketiga dimensi tersebut dapat mempengaruhi

pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Dengan mengetahui tiga dimensi tersebut, diharapkan dapat disusun kerangka kerja yang bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme guru BK terhadap kinerjanya.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pembina guru di lapangan, baik pada level pimpinan (Kepala Sekolah) maupun lembaga di atasnya (Pengawas sekolah) untuk itu melakukan pembinaan yang lebih terarah pada profesionalisme guru Bimbingan dan Konseling terhadap kinerja yang dilakukan khususnya di sekolah yang bersangkutan. Kelemahan-kelemahan guru BK yang tampak dari hasil penelitian ini diupayakan untuk diperbaiki agar pelaksanaan program kerja dapat terealisasi dengan baik atau dapat ditingkatkan kualitasnya. Di lain pihak, profesionalisme yang sudah baik dari guru Bimbingan dan Konseling yang tampak dari hasil penelitian ini dapat terus dibina dan didorong untuk ditingkatkan.

Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada sekolah akan pentingnya pendidikan khususnya pada bidang – bidang bimbingan konseling.